



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN SUSUKAN
TAHUN 2025**

**Jln. Raya Ki Bagus Rangin No.02 Susukan
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON**

Lampiran Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2025

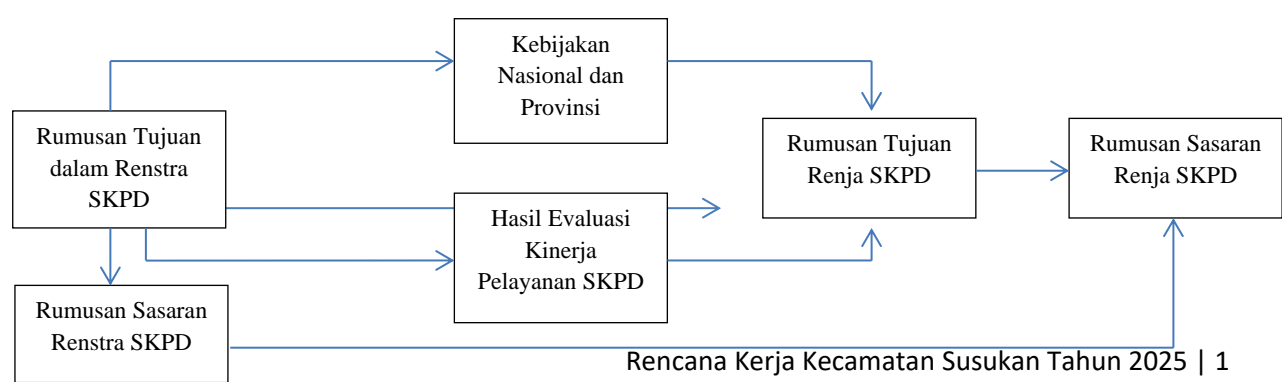
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Susukan Tahun 2025-2026 (Renstra Perang Daerah), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Kecamatan Susukan memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Susukan, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- o. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- p. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2025-2026;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (nomor 1 Seri D);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
- s. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

1.3. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Susukan untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Susukan.

- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Susukan Tahun 2025 adalah:
1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Susukan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Susukan Tahun 2025

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Susukan
- 3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rancana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Susukan Tahun 2025

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN SUSUKAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Susukan Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Susukan Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program, Kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Susukan.

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.259.798.932,00 dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.191.630.088,00 atau 96.98%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Susukan Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 2.045.315.332 dan terealisasi sebesar Rp. 1.977.216.178 sisa sebesar Rp.68.099.154 atau tercapai sebesar 96,67%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

Outcome Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya prosentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah: 100%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.320.000 dan

teralisasi sebesar Rp. 1.320.000 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Peganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 780.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 780.000.00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan: 2 Dokumen atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 540.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.777.853.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.711.184.408,00 sisa sebesar Rp. 66.669.192,00 atau tercapai sebesar 96,25 %.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.776.443.600,00 dengan realisasinyaRp. 1.709.774.408,00 sisa sebesar Rp. 66.669.192,00 atau tercapai sebesar 96,25 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan: 12 Pegawai atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 780.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan: 1 Laporan atau telah tercapai 100 %

- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 630.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan: 18 Laporan atau telah tercapai 100 %

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.099.300,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.099.300,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 996.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 996.200,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan: 9 Jenis atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.399.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.399.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa alat pendingin bertambahnya peralatan perlengkapan kantor: 3 Jenis atau telah tercapai 100 %

- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.650.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran makanan dan minuman dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman: 11 Bulan atau telah tercapai 100 %

- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.492.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.492.500,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran barang cetakan dan penggandaan dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan: 7 Jenis atau telah tercapai 100 %

- e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 986.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 986.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan (koran), dalam rangka menambah informasi pengetahuan para pegawai Kecamatan Susukan selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran koran dan terpenuhinya kebutuhan informasi: 2 Jenis atau telah tercapai 100 %

- f. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.975.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.975.600,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor: 23 Jenis atau telah tercapai 100 %

- g. Sub Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 600.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output sub kegiatan adalah tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas: 8 Kali atau telah tercapai 100 %

- D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.229.232,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.366.154,00 sisa sebesar Rp. 863.078,00 atau tercapai sebesar 94,33 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

- a. Sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.199.232,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.336.154,00 sisa sebesar Rp. 863.078,00 atau tercapai sebesar 93,46 %.

Output sub kegiatan adalah jumlah rekening yang dibayarkan: 1 Rekening atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.030.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.030.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: 3 Unit atau telah tercapai 100 %

E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.813.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 218.246.316,00 sisa sebesar Rp. 566.884,00 atau tercapai sebesar 99.74 %.

Output kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.706.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.706.500,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara: 9 Unit atau telah tercapai 100 %

b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.152.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.613.700,- sisa sebesar Rp. 538.800,00 atau tercapai sebesar 74,97 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya: 10 Unit atau telah tercapai 100 %

c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.954.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 155.926.116,00 sisa sebesar Rp. 28.084,00 atau tercapai sebesar 99,98 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara: 1 Unit atau telah tercapai 100 %

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 96.046.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.029.110,00 sisa sebesar Rp. 16.890,00 atau tercapai sebesar 99,98%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.300.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.800.000,00 sisa sebesar Rp. 00,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,00 sisa sebesar Rp. 00,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 4 Laporan atau telah tercapai 100 %

- B. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.883.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.866.110,00 sisa sebesar Rp. 16.890,00 atau tercapai sebesar 99,92 %.

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.883.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.866.110,00 sisa sebesar Rp. 16.890,00 atau tercapai sebesar 99,92 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- C. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.863.000,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 44.863.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 2 Laporan.

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.140.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.140.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100%

Output *Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan sebanyak 12 laporan atau telah tercapai 100 %*

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.723.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 43.723.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 25.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.737.200,00 sisa sebesar Rp. 52.800,00 atau tercapai sebesar 99,80 %.

Outcome Program ini adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.737.200,00 sisa sebesar Rp. 52.800,00 atau tercapai sebesar 99,80 %.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.790.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.737.200,00 sisa sebesar Rp. 52.800,00 atau tercapai sebesar 99,80 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 5.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.580.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Outcome Program ini adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.580.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 1 Laporan

- a. Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.580.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.580.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp. 83.407.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.407.600,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Outcome Program ini adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.407.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.407.600,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.407.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.407.600,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional: 4 Laporan atau telah tercapai 100 %

6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp. 3.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Outcome Program ini adalah Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Susukan

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Susukan dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran

Kantor Kecamatan Susukan dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Susukan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2026.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Susukan berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Susukan. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Susukan. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Susukan.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Susukan yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Susukan.

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Dearah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Susukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan	RENSTRA Kecamatan Susukan 2025-2026	- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait	- Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga

	Kepada Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 	tugas dan kewenangan pelayanan	pelayanan masih terbatas <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan 	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti

	dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa		jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan
--	---	--	--	--	--

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Susukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Susukan ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana

2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Susukan ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 diantaranya:

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan yang memiliki tujuan untuk Penjaringan Khafilah MTQ Tingkat Kecamatan.
4. Pembiayaan Kompetisi Sepak Bola U-12 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan minat cabang olahraga sepak bola Tingkat Kecamatan.
5. Pembiayaan Kecamatan Susukan Bersholawat yang memiliki tujuan untuk Syiar Agama Islam Tingkat Kecamatan.
6. Pembiayaan Festival tematik pentas seni pertunjukan tradisional Cirebonan yang memiliki tujuan untuk Mempertahankan budaya tradisional cirebon.
7. Pembiayaan Pembuatan Ruang Baca, Menyusui, taman bermain anak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
8. Pembiayaan PHBN/HUT RI yang memiliki tujuan untuk Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Susukan Tahun 2025 sebagaimana data terlampir (Lampiran I).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUSUKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Susukan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Susukan dapat dilihat pada lampiran (Lampiran II).

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan Pembangunan Nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem yang terintegrasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota, serta untuk memberikan arahan pembangunan nasional tahun 2025. Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Penetapan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Arah kebijakan terdiri RKP 2025 meliputi :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Desent Job;
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
5. Revitalisasi industri dan Penguatan Reset Terapan;
6. Pembangunan Rendah Korban dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim);
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain Air bersih dan Sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi :

1. Prioritas Nasional 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Prioritas Nasional 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Prioritas Nasional 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Prioritas Nasional 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,
5. Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
6. Prioritas Nasional 5, yaitu Melanjutka Hairisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

7. Prioritas Nasional 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
8. Prioritas Nasional 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
9. Prioritas Nasional 8, yaitu, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

3.3. Program dan Kegiatan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sebagai Berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Perangkat Daerah

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyediaan Bahan/Material
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan Mebel
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
3. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

B. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUSUKAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Susukan Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Susukan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Susukan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2025, adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Susukan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel Berikut:



RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SKPD: 7-1.0-0.0-0.20. KECAMATAN SUSUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				2.234.597.364				5.219.228.620
0.00.	NON BIDANG URUSAN				2.234.597.364				5.219.228.620
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan sop pelayanan pemerintah		100 Prosen	2.234.597.364			100 Prosen	5.219.228.620
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	8.904.800	PIS		6 Jenis	49.587.720
0.00.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	3 Dokumen	3.877.200	PIS		3 Dokumen	4.000.000
0.00.01.2.01.000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Dokumen	2.090.000	PIS		1 Dokumen	16.000.000
0.00.01.2.01.000 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Dokumen	986.000	PIS		1 Dokumen	11.000.000
0.00.01.2.01.000 4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	5.000.000
0.00.01.2.01.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000

0.00.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	15 Laporan	1.951.600	PIS		15 Laporan	2.057.000
0.00.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Laporan	-			1 Laporan	1.530.720
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	1.941.669.800	PIS		3 Jenis	3.604.680.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	15 Orang/bulan	1.934.390.000	PIS		15 Orang/bulan	3.595.000.000
0.00.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Laporan	5.015.400	PIS		1 Laporan	6.655.000
0.00.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	18 Laporan	2.264.400	PIS		18 Laporan	3.025.000
0.00.01.2.05.	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	-	PIS		25 Orang	20.000.000
0.00.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	26 Paket	-			26 Paket	20.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	85.171.300	PIS		8 Jenis	184.740.900
0.00.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	15 Paket	4.341.400	PIS		15 Paket	60.000.000
0.00.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Paket	55.749.000	PIS		12 Paket	10.000.000

0.00.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanggayang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Paket	-			12 Paket	50.000.000
0.00.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan		35 Paket	-			35 Paket	5.190.900
0.00.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	8 Paket	4.206.200	PIS		8 Paket	5.000.000
0.00.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	2 Dokumen	-			2 Dokumen	4.000.000
0.00.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	40 Paket	13.295.200	PIS		40 Paket	30.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	200 Laporan	3.300.000	PIS		200 Laporan	11.550.000
0.00.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	96 Laporan	4.279.500	PIS		96 Laporan	9.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	-	PIS		4 Jenis	680.000.000
0.00.01.2.07.000 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	9 Unit	-			9 Unit	150.000.000
0.00.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	4 Unit	-			4 Unit	130.000.000
0.00.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	4 Unit	-			4 Unit	100.000.000

0.00.01.2.07.001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Unit	-			1 Unit	300.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	24.861.664	PIS		2 Jenis	115.000.000
0.00.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	1 Laporan	16.541.664	PIS		2 Laporan	90.000.000
0.00.01.2.08.000 3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	11 Laporan	8.320.000	PIS		20 Laporan	25.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	173.989.800	PIS		5 Jenis	565.220.000
0.00.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	10 Unit	38.793.500	PIS		10 Unit	58.720.000
0.00.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jl Ki Bagu Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	10 Unit	1.840.000	PIS		10 Unit	6.500.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	2 Unit	133.356.300	PIK, PIS		2 Unit	500.000.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				344.835.500				1.252.460.900
7.01.	KECAMATAN				344.835.500				1.252.460.900
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	171.293.500			100 Prosen	452.550.900
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	42.665.500	PIK, PIS		2 Jenis	133.814.000

7.01.02.2.01.000 1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		3 Laporan	12.660.000	PIK		3 Laporan	60.000.000
7.01.02.2.01.000 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	30.005.500	PIS		13 Dokumen	73.814.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Jenis	28.628.000	PIS		3 Jenis	122.000.000
7.01.02.2.02.000 2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	4 Laporan	-			4 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Laporan	28.628.000	PIS		20 Laporan	72.000.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahanyang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	100.000.000	PIS		3 Jenis	196.736.900
7.01.02.2.04.000 1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang Dilaksanakan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	40.000.000
7.01.02.2.04.000 2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	-			10 Laporan	45.000.000
7.01.02.2.04.000 3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Laporan	100.000.000	PIK, PIS		30 Laporan	111.736.900
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	66.316.000			100 Prosen	149.545.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	66.316.000	PIS		3 Jenis	149.545.000

	Desa								
7.01.03.2.01.000 2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	2 Dokumen	-			2 Dokumen	50.000.000
7.01.03.2.01.000 3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Laporan	66.316.000	PIK, PIS		20 Laporan	99.545.000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM	Prosentase Kegiatan Kordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	103.506.000			100 Prosen	148.365.000
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	50.000.000	PIS		12 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.000 1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	4 Laporan	50.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	53.506.000	PIS		12 Laporan	98.365.000
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya diBidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangan dan/atau KepolisianNegara Republik Indonesia	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Laporan	53.506.000	PIS		20 Laporan	98.365.000
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	-			100 Prosen	252.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	-	PIS		8 Jenis	252.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.000 2.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		354 Orang	-			354 Orang	84.000.000
7.01.05.2.01.000 3.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		4 Orang	-			4 Orang	84.000.000
7.01.05.2.01.000 8.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	-			12 Dokumen	84.000.000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	3.720.000			100 Prosen	250.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		14 Jenis	3.720.000	PIS		14 Jenis	250.000.000
7.01.06.2.01.000 1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	12.000.000
7.01.06.2.01.000 2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	4 Dokumen	-			4 Dokumen	11.000.000
7.01.06.2.01.000 3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	120.000.000
7.01.06.2.01.000 5.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	11.000.000
7.01.06.2.01.000 6.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jl. Ki Bagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	5.000.000
7.01.06.2.01.000 7.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.000 8.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	5.000.000
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	5.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome) /	Rencana Tahun				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	

	Daerah dan Program/Kegiatan	Kegiatan (Output)	2024				Penting		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0010.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0014.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0015.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jln Kibagus Rangin (Desa Bojong kulon - Kecamatan susukan)	12 Dokumen	-			12 Dokumen	11.000.000
7.01.06.2.01.0016.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12 Dokumen	3.720.000	PIS		12 Dokumen	40.000.000
J U M L A H					2.579.432.864				6.471.689.520

Sumber, 10 Juni 2024
CAMAT SUSUKAN

AUGUST PENTRISTIANTO, SSTP.
Pembina Tk.I
NIP. 19750812 199603 1 002

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Susukan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Susukan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Susukan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Susukan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR